



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2023

**DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, 21 Oktober 2023

Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan III Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain:

1. Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah, dan instansi lintas sektoral perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Metode pelaksanaan kegiatan perlu beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, dengan memaksimalkan pertemuan secara daring *ataupun hybrid* dan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha/swasta untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan pekerjaan secara periodik, serta monitoring dan evaluasi.
3. Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah perlu terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha maupun calon investor.
4. Sinergi dalam pelaksanaan kegiatan antar unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi meupun dengan Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP untuk percepatan pencapaian sasaran dan kinerja organisasi.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama Tahun 2023, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	22
3.2.2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Peluang Investasi Yang <i>Ready to Offer</i>	25
3.2.3. Sasaran Strategis 3: Terlaksananya promosi usaha dan investasi	29
3.2.4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	33
3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	39
3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha.....	44
3.2.7. Sasaran Strategis 7: Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.....	56

3.2.8. Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi 57

BAB IV. PENUTUP..... 66

4.1. Kesimpulan..... 66

4.2. Rekomendasi..... 66

4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi triwulan II 67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2023.....	22
Tabel 3.3	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan III Tahun 2023	24
Tabel 3.4	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang <i>Ready to Offer</i> Triwulan III Tahun 2023	26
Tabel 3.5	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan III 2023.....	31
Tabel 3.6	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan III 2023.....	35
Tabel 3.7	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan III 2023	39
Tabel 3.8	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan III 2023.....	47
Tabel 3.9	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan III Tahun 2023.....	51
Tabel 3.10	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan III Tahun 2023...	55
Tabel 3.11	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) pada Triwulan III Tahun 2023.....	60
Tabel 3.12	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan III tahun 2023.....	62

Tabel 3.13	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja <i>Startup</i> Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	65
Tabel 3.14	Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	67
Tabel 3.15	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	68
Tabel 3.16	Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023.....	69
Tabel 3.17	Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan III Tahun 2023	70
Tabel 3.18	Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023	71
Tabel 3.19	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023.....	72
Tabel 3.20	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan III Tahun 2023.....	74
Tabel 3.21	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023.....	74
Tabel 3.22	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023	75
Tabel 3.23	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)	4
Gambar 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan	5
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	5
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan	6
Gambar 3.1	Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023	19
Gambar 3.2	Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi	23
Gambar 3.3	Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program	25
Gambar 3.4	Kegiatan <i>Benchmarking</i> industri pengolahan rumput laut di Serang, Banten	26
Gambar 3.5	Kegiatan FGD peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi	27
Gambar 3.6	Kegiatan survei lapang penyusunan dokumen peluang investasi <i>ready to offer</i> di Kabupaten Wakatobi	29
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi.....	31
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan UMKM Expo	32
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Pendampingan Investasi usaha Kelautan dan Perikanan	33
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Persiapan Sail Teluk Cendrawasih.....	33
Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang	35
Gambar 3.12	Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar	36
Gambar 3.13	Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha.....	37
Gambar 3.14	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik pada Direktorat Usaha dan Investasi	37
Gambar 3.15	Pendampingan Puspita di Kabupaten Rembang	40

Gambar 3.16	Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha di Kota Bandar Lampung.....	41
Gambar 3.17	Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kota Surakarta	41
Gambar 3.18	Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha hasil KP di Kabupaten wakatobi	43
Gambar 3.19	Pendampingan Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP Hasil Perikanan di Kota Bandar Lampung.....	43
Gambar 3.20	Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha dan investasi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo	46
Gambar 3.21	Dokumentasi Kegiatan FGD Klaster Daya Saing di Konawe Selatan	50
Gambar 3.22	Dokumentasi Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru 2023	51
Gambar 3.23	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan dan Penciptaan Wirausaha	52
Gambar 3.24	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Dan Akses Permodalan di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung.....	53
Gambar 3.25	Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan evaluasi wirausaha	53
Gambar 3.26	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Kabupaten Tulungagung	54
Gambar 3.27	Dokumentasi Kegiatan fasilitasi Pembiayaan di Kebumen	56
Gambar 3.28	Dokumentasi Kegiatan fasilitasi Pembiayaan di Rembang	57
Gambar 3.29	Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Debitur Potensial di Kabupaten Pekalongan	58
Gambar 3.30	Dokumentasi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TPUKP.....	61
Gambar 3.31	Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Pengolah dan Pemasar Produk Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang	63
Gambar 3.32	Kegiatan Indentifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Kota Pontianak	66
Gambar 3.33	Kegiatan Indentifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Jakarta dan Jawa Barat	66
Gambar 3.34	Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 20 Juli 2023.....	72

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

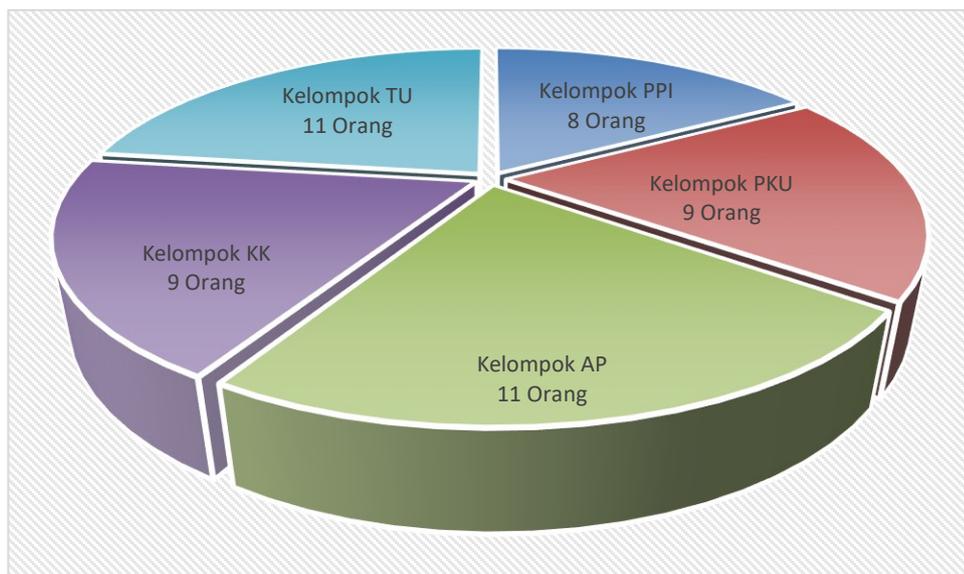
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

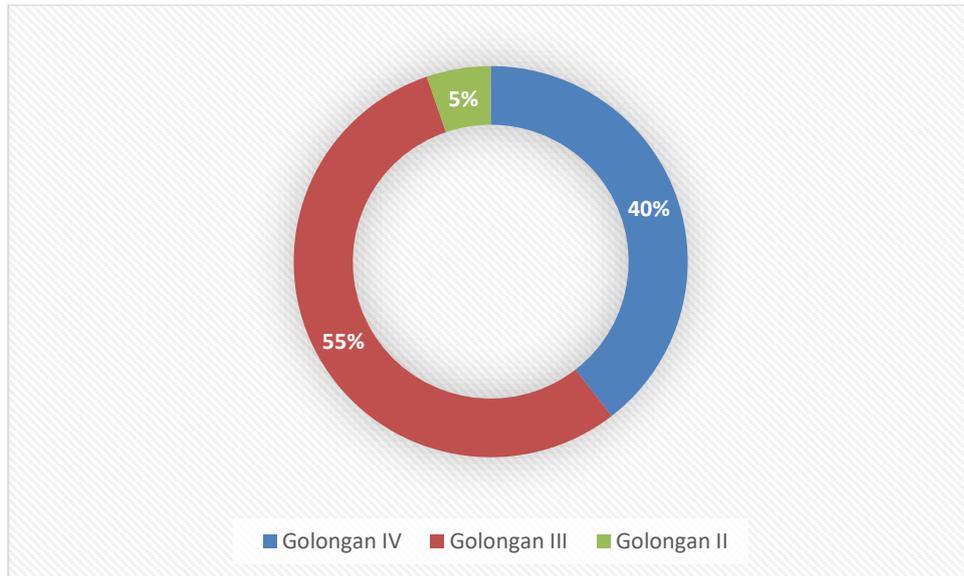
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berjumlah 49 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang tersebar di 4 Kelompok dan Kelompok Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Kelompok Pemetaan dan Peluang Investasi (PPI) sebanyak 8 orang; Kelompok Pelayanan dan Kemitraan Usaha (PKU) sebanyak 9 orang; Kelompok Akses Permodalan (AP) sebanyak 11 orang; Kelompok Kewirausahaan dan Kelembagaan (KK) sebanyak 9 orang; dan Kelompok Tata Usaha sebanyak 11 orang.



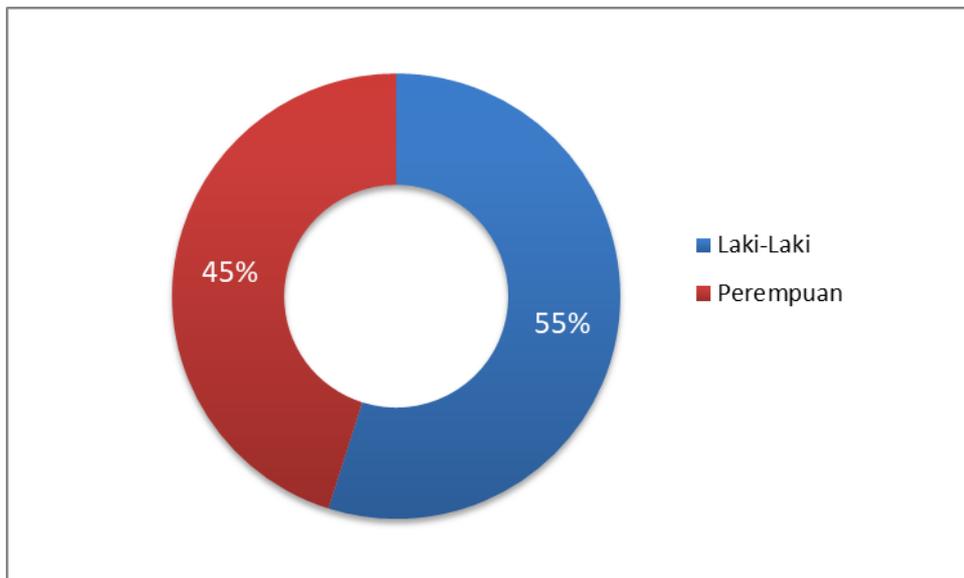
Gambar 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 55%.



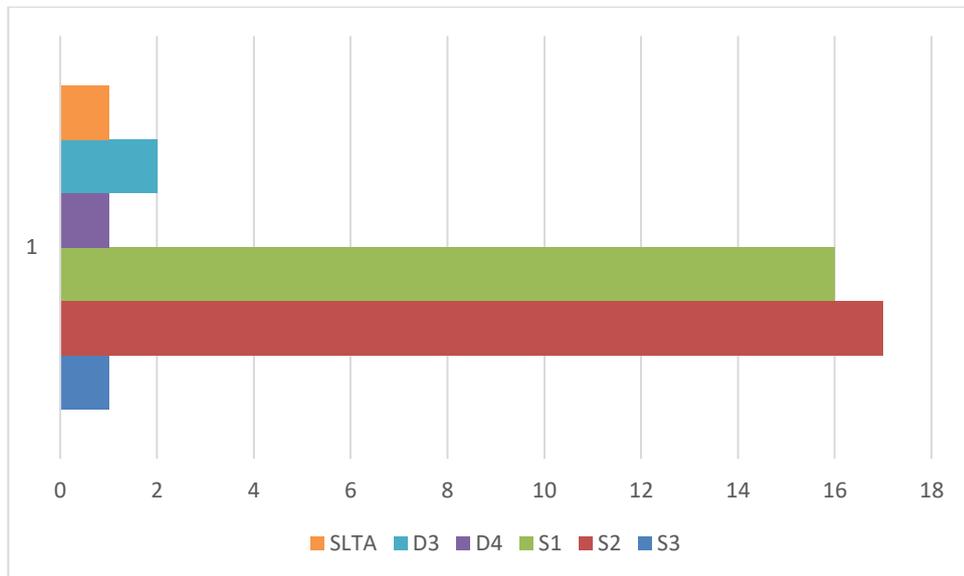
Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 16 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S2, yakni mencapai 45%.



Gambar 1.4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2023, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan III 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan III Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
 - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
 - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
 - 2) penyusunan profil peluang investasi.
 - c. Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan

merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi peningkatan kapasitas Klaster Daya Saing ini adalah:

- 1) Pembentukan Lembaga Klaster Daya Saing KP; dan
 - 2) Pengembangan Lembaga Klaster Daya Saing KP;
- d. Pemantuan dan pengendalian investasi. Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:
- 1) Pemantuan rencana dan realisasi serta tren investasi; dan
 - 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi.
- Dalam pemantuan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:
 - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
 - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - 3) Pendampingan dan monitoring.
 - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah.
- Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
- 1) penjaringan calon debitur potensial,
 - 2) peningkatan kelayakan usaha,
 - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,

- 4) pendampingan manajemen usaha,
 - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
 - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
- c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
 - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
 - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
 - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
- d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.
- Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:
- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
 - 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
 - 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
 - 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
 - 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
 - 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
 - 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023.

Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan I mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi

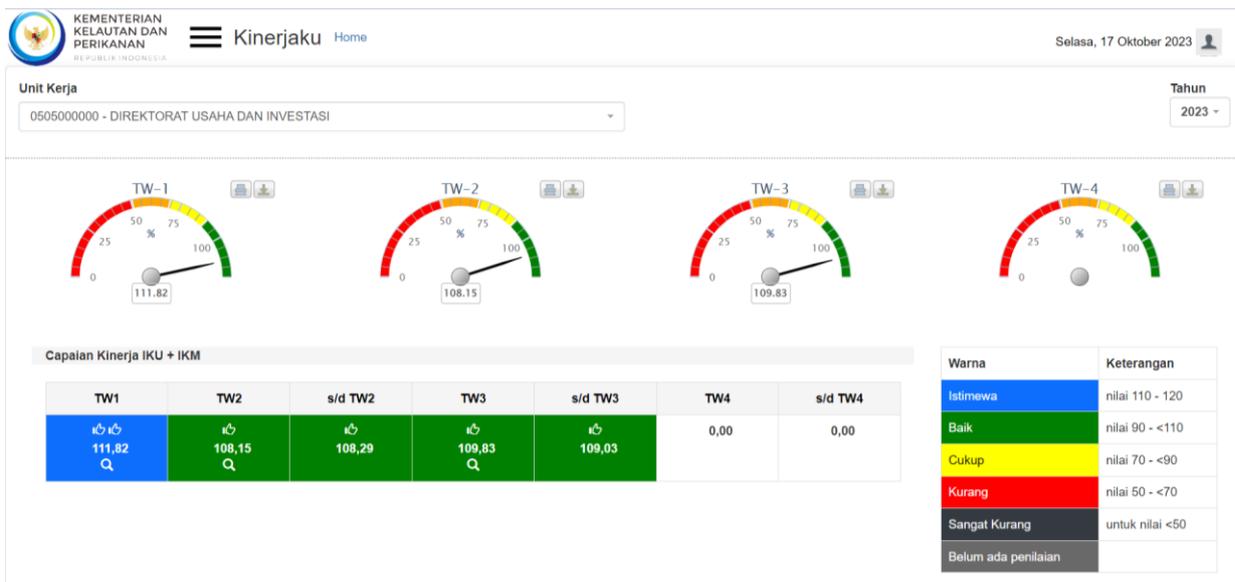
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2	Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4
3	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4	Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5	Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35
		7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3
6	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	585
		9	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500
		10	UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135
		11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84
		12	Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4.794
8	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2
		16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
		17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤5
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
		20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023 sebesar 109,83%. Capaian ini meningkat dibandingkan NPSS Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 108,29% dan capaian triwulan III tahun 2022 sebesar 101,70%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2023 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan III Tahun 2023, terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi
Triwulan III Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2023	TW III	TW III	Sd TW III	% thd Target TW III	% sd thd Target 2023
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-	-
3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4	-	1	1	-	25
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3	-	1	2	-	66,66
5	Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1	-	-	-	-	-
6	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35	6	6	16	100	45,71
7	Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3	-	1	1	-	33,33
8	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	585	170	170	350	100	59,83
9	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500	150	180	334	120	66,80
10	UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135	650	707	1.415	108,77	66,28
11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84	25	26	61	104	72,62

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2023	TW III	TW III	Sd TW III	% thd Target TW III	% sd thd Target 2023
12	Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8	-	1	2	-	25
13	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4794	-	-	-	-	-
14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	-	-	-	-
15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	76	-	-	-	-
16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	-	-	-	-	-
17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤5	-	-	-	-	-
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	100	-	133,33	133,33
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1	-	-	-	-	-
20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	100	-	108,7	108,7
21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	-	-	-	-	-
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan

IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut belum dapat dihitung pada Triwulan III, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi sebanyak 1 kali pada triwulan III pada tanggal 25 September 2023 di ruang Direktur Usaha dan Investasi.

Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	-	5	-	-	-	-



Gambar 3.2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk mengevaluasi capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan.

IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2023 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2023. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 8%. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan III, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program baru dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 3.3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	-	8	-	-	-	-

Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan sebanyak 1 kali pada triwulan III pada tanggal 4 September 2023 di ruang rapat Direktorat Usaha dan Investasi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi untuk membahas capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.



Gambar 3.3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer*

IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer*

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan perbahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

Tabel 3.4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang *Ready to Offer* Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
3	Peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	-	4	-	-	25	-

Kegiatan penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan III tahun 2023 masih pada tahap pengumpulan data lapangan, sehingga belum terdapat capaian output pada triwulan III. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 4 dokumen, maka akumulasi capaian output sampai dengan triwulan III adalah sebesar 25%.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. *Benchmarking* industri pengolahan rumput laut di Serang, Banten

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 dan bertujuan untuk pengayaan informasi terkait industri hilir rumput laut dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang bergerak dalam usaha budidaya dan pengolahan rumput laut. Kunjungan dilakukan ke PT.Gumindo Perkasa Industri yang bergerak di bidang pengolahan Rumput Laut dengan produk yang dihasilkan berupa *Refined Carrageenan* dan Formulasi *Blended Carrageenan*. Perusahaan ini berlokasi di Mangunreja, Puloampel, Serang Regency, Banten. Jumlah Pegawai yang bekerja pada PT.Gumindo berjumlah 30 orang, dengan rata-rata produksi sebesar 175 ton/bulan untuk *Refined Carrageenan*.



Gambar 3.4 kegiatan *Benchmarking* industri pengolahan rumput laut di Serang, Banten

Proses pengolahan rumput laut di PT.Gumindo melalui beberapa tahapan yaitu pencucian tahap 1, *boiling* (perebusan), isolasi Carageenan, *bleaching*, *washing*, *drying* (pengeringan), dan *milling* (penepungan). Mitra yang bekerja sama dengan PT.Gumindo kebanyakan adalah industri makanan seperti pembuatan *Jelly*, *meat processing*, dan *pet food*.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi

Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 dibuka oleh Bupati Kabupaten Wakatobi, dan dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan KKP, perwakilan OPD Kabupaten Wakatobi, dan perwakilan K/L terkait. Tujuan FGD untuk menggali masukan dan saran dari para stakeholder terkait model bisnis hilirisasi rumput laut dan pengayaan data dan informasi untuk penyusunan peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Wakatobi.



Gambar 3.5 kegiatan FGD peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi

Hasil FGD sebagai berikut:

- a. Tantangan terbesar di Kabupaten Wakatobi adalah ketersediaan air bersih. Dalam hal ini, Biro Keuangan KKP menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Wakatobi dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Tugas Perbantuan (TP) yang ada di KKP sesuai dengan juknisnya untuk mengatasi kendala air bersih.
- b. Adapun pemanfaatan batok kelapa dalam budidaya rumput laut, perlu dikaji lebih lanjut dalam hal daya tahan pemanfaatannya. Bupati berharap kegiatan pasca panen dilakukan dengan baik agar diperoleh produk yang lebih berkualitas, untuk mendapatkan nilai produk yang lebih tinggi. Selain itu

- diperlukan dukungan investasi usaha rumput laut yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. Perlu peningkatan pemahaman kepada pembudidaya tentang pola tanam untuk keberlanjutan suplai bahan baku bagi industri hilir dan penjualan rumput laut basah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, perlu disusun strategi kebijakan tata kelola usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Dapat dipertimbangkan masuknya BUMDes dalam sistem hilirisasi. Industri hilir yang paling memungkinkan segera dilakukan yaitu pupuk berbahan baku rumput laut.
 - d. Terkait kendala pembuangan limbah, Wakatobi telah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), namun perlu dipastikan limbah yang dihasilkan dari industri ini dapat diolah menggunakan IPLT Kabupaten Wakatobi. Terkait kendala listrik, agar pihak PLN dapat membantu mengatasinya dengan alternatif listrik tenaga surya.
 - e. Terkait wilayah yang digunakan adalah Kawasan Taman Nasional bahwa pemanfaatan potensi zona tradisional dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, dan terdapat 5 kelompok yang telah diinventarisir. Modeling ini menjadi bagian dari seluruh pengembangan di Wakatobi (hanya 8 persen yang akan dibangun). Pelaku usaha yang ada akan tetap berjalan dengan perbaikan-perbaikan, dan pabrik rumput laut yang ada di Bombana dan Buton akan dimasukkan dan disinergikan dalam program ini. Saat ini, jenis rumput laut yang dikembangkan di Wakatobi adalah *Spinosum*, dan melalui kegiatan modeling ini akan dikenalkan jenis *E. Cottonii* yang harga jualnya lebih tinggi dari *spinosum*.
3. Survei lapangan penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer*
Kegiatan survei/kunjungan lapangan di Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada tanggal 15 – 22 September 2023 dalam rangka penyusunan peluang investasi *ready to offer* dan bertujuan untuk pengayaan informasi terkait industri hilir rumput laut. Kunjungan dilakukan ke beberapa instansi dan stakeholder terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), BPS, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Taman Nasional

Wakatobi, Koperasi Selat Sempo, Kepala Desa Liya Togo, dan pembudidaya rumput laut setempat.



Gambar 3.6 kegiatan survei lapangan penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Wakatobi

Hasil survei lapangan antara lain:

- a. Semua instansi lintas sektor terkait siap mendukung program hilirisasi rumput laut di Wakatobi, seperti Dinas PU akan mengusulkan pembangunan IPAL untuk mendukung industri rumput laut di Wakatobi, PLN akan mengusulkan penambahan listrik di lokasi rencana pembangunan pabrik yang sudah ditetapkan.
 - b. Usulan Koperasi Selat Sempo terkait lokasi rumah pengering rumput laut di pinggir laut untuk mempermudah mobilisasi hasil panen rumput laut basah ke rumah pengering. Draft PKS antara Koperasi Selat Sempo dengan Koperasi Sinergi tentang pemanfaatan Gudang SRG masih dalam proses pembahasan.
 - c. Pembudidaya bersedia menjual rumput laut basah apabila harga yang ditawarkan sesuai dan perlu skema rekayasa sosial agar peran koperasi dan pengepul dapat berjalan beriringan. Pembudidaya berharap koperasi dapat mengendalikan harga rumput laut. Selain itu, perlu penguatan kelembagaan koperasi dalam hal permodalan dan mekanisme jual beli rumput laut.
4. Penyusunan Booklet peluang investasi usaha 5 komoditas utama
- Kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pemasaran pada 20 September 2023 di Bekasi. Rapat menyepakati outline booklet dan pembagian peran dalam pengumpulan data. Beberapa poin yang dibahas dalam rapat antara lain:
- (i) keunggulan profil usaha yang ditawarkan;
 - (ii) industri pengolahan udang

terintegrasi; (iii) penulisan menggunakan kaidah 4W+1H untuk menjelaskan keunggulan investasi; (iv) booklet harus menjawab kebutuhan informasi dari calon investor; (v) booklet menggunakan bahasa positif, lugas, dan mengangkat isu yang menarik bagi investor.

5. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data peluang investasi *yang ready to offer* di beberapa lokasi yaitu komoditas Udang di Cilacap dan Kebumen, komoditas Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi, dan Nila Salin di Kabupaten Pati.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja peluang investasi yang *ready to offer* pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp750.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 508.167.127,- atau setara dengan 67,76% dari total anggaran.

i. Sasaran Strategis 3

Terlaksananya promosi usaha dan investasi

IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor. Indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP merupakan target tahunan sehingga perhitungan capaian baru dilakukan pada saat penilaian akhir tahun anggaran 2023.

Tabel 3.5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan III 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
4	Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	-	3	1	-	66,66	75

Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan III tahun 2023 sebanyak 1 kegiatan, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah tercapai sebanyak 2 kegiatan atau tercapai 66,66% dari target tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 75%, hal ini dikarenakan perbedaan nilai target yang ditetapkan yakni sebanyak 4 kegiatan promosi di tahun 2022.

Adapun kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama triwulan III sebagai berikut:

1. Promosi peluang investasi hilirisasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada 18 Juli 2023 di Surabaya. Kegiatan bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi hilirisasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi kepada para pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan rumput laut. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal PDS dan dihadiri oleh pelaku usaha pengolahan dan eksportir rumput laut, perwakilan pemerintah daerah, perbankan dan jasa logistik. Pada kesempatan ini Bupati Wakatobi menawarkan peluang investasi usaha hilir rumput laut, Ditjen Perikanan Budidaya menjelaskan tentang modeling budidaya rumput laut *Eucheuma cottonii* di Kabupaten Wakatobi, serta *Vice President* Angkutan Barang Non Komersial PT.PELNI menyampaikan dukungan dalam rangka distribusi produk rumput laut dari Kabupaten Wakatobi.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi

- Hasil dari kegiatan promosi yaitu: (i) Beberapa perusahaan menyatakan minat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peluang investasi di Kabupaten Wakatobi, salah satu diantaranya PT. Asia Sejahtera Mina yang akan mengirimkan tim untuk identifikasi lapang; (ii) Selanjutnya akan dilakukan langkah koordinasi dan tindak lanjut pemastian minat investasi usaha hilir rumput laut di Kabupaten Wakatobi; dan (iii) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PDSPKP dengan Bupati Wakatobi tentang Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Rumput Laut dalam rangka Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi.
2. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional, Direktorat Jenderal PDSPKP berpartisipasi pada UMKM Expo yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 10-13 Agustus 2023. Stand KKP menampilkan: a) Peluang investasi industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen dalam rangka mendukung BUBK melalui penayangan video, penyebaran booklet dan hadir sebagai narasumber pada talkshow; b) Pameran produk olahan hasil perikanan dengan menggandeng UMKM dari Puspita Karanganyar dan Puspita Rembang; c) Gerai layanan usaha yang memberikan layanan perizinan bagi UMKM yang mau mendaftarkan NIB; dan d) Layanan pembiayaan bekerja sama dengan BNI untuk sosialisasi kredit program khususnya KUR. Hasil kegiatan ini terdapat 16 pelaku usaha perikanan yang melakukan konsultasi perizinan berusaha dan nilai transaksi penjualan produk UMKM sebesar Rp10.240.000,-.



Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan UMKM Expo

3. Pendampingan Penjajakan Investasi PT.Indo Rama di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 14-17 Juli 2023. PT.Indo Rama memiliki rencana investasi usaha rumput laut terintegrasi dari hulu ke hilir dan berencana menerapkan teknologi tambak untuk budidaya rumput laut jenis *Ulva* dan *Eucheuma cottonii*, serta menyampaikan kebutuhan lahan seluas 100 ha dengan persyaratan lokasi lahan dekat dengan laut

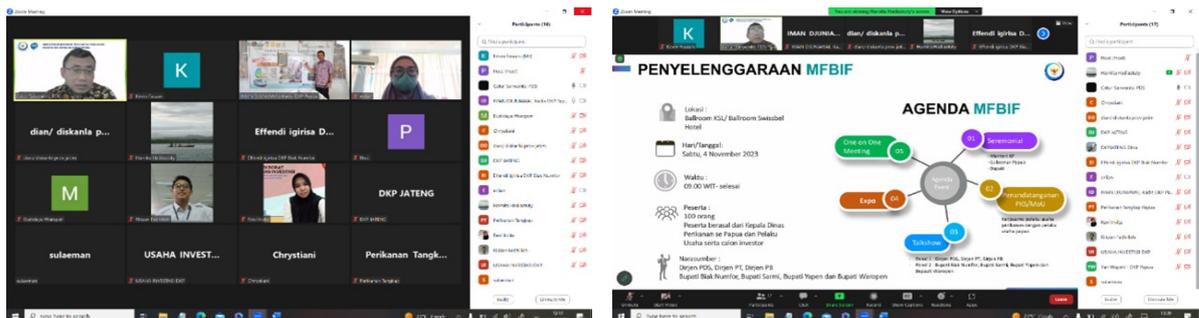
(maksimal 1 km). Pemda telah menawarkan lokasi di Desa Liya, dan akan melakukan pemetaan sesuai kebutuhan PT.Indo Rama dan merumuskan skema pemanfaatan lahannya. Pada tahap awal, PT.Indo Rama akan melakukan uji coba budidaya rumput laut di daratan untuk jenis ulva sp dengan luasan lahan 10m x 10m.

4. Pendampingan audiensi PT.Agro Investama dengan Investor Jepang yang memiliki rencana investasi membangun pabrik pupuk berbahan baku rumput laut di Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nilai Investasi sekitar Rp5 sd10 Milyar dengan status PMDN.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Pendampingan Investasi usaha Kelautan dan Perikanan

5. Dalam rangka persiapan *Marine and Fisheries Business Forum* untuk mendukung kegiatan Sail Teluk Cendrawasih, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi antara Dinas Perikanan Penyelenggara Sail Teluk Cendrawasih (Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen dan Waropen) dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Persiapan Sail Teluk Cendrawasih

Hasil pertemuan yaitu 4 Kabupaten penyelenggara Sail Teluk Cendrawasih menyiapkan data detail terkait produk yang akan ditawarkan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI), detail peluang investasi, infrastruktur pendukung investasi, kemudahan perizinan, dan insentif investasi yang diberikan. Selanjutnya Dinas KP Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah akan memetakan UPI yang memiliki minat untuk membeli produk yang ditawarkan 4 kabupaten tersebut atau pelaku usaha yang berminat berinvestasi.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp2.086.981.000,-, Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp1.163.685.572,- atau setara dengan 55,76% dari alokasi anggaran.

ii. **Sasaran Strategis 4**

Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan

IK5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan

Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator kinerja ini baru di tahun 2023. Indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan III, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 3.6. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan III 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
5	Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	1	-	-	-	-

Kegiatan Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan III, meliputi:

1. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sosialisasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengundang Direktorat Usaha dan Investasi sebagai salah satu narasumber yaitu di Kabupaten Rembang dan Tulungagung, bersinergi dengan Direktorat Pemasaran dan DPMPTSP Kabupaten/Propinsi. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan. Pada kegiatan ini dilaksanakan gerai pelayanan perizinan berusaha yang melayani konsultasi dan pembuatan NIB kepada 10 pelaku usaha, dan telah diterbitkan 1 NIB serta Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar (SS) untuk pemindang yang ada di Rembang dan Tulungagung.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang

2. Penerbitan Sertifikat Standar

Selama triwulan III 2023, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan verifikasi kelengkapan standar usaha. Pertemuan bertujuan untuk membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha, dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Setjen, Bagian Hukum Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Tim Kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Selama periode Juli - September 2023, telah diterbitkan 15 sertifikat standar kepada 7 pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3.12 Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar

3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha telah dilakukan kunjungan ke 2 (dua) UPI yang telah memiliki sertifikat standar di Kabupaten Sorong yaitu PT. Dwi Bina Utama (PMA Jepang) dan PT. Marina Sorong (PMA Malaysia). Hasil monitoring terhadap PT. Dwi Bina Utama diperoleh informasi tentang keterlambatan penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU), ketidaktahuan atas kewajiban pelaporan LKU, serta kegiatan pengolahan yang tidak rutin dilakukan karena menyesuaikan ketersediaan bahan baku. Sementara hasil monitoring terhadap PT. Marina Sorong diperoleh informasi bahwa bisnis utamanya saat ini adalah di bidang pariwisata berupa restoran dan pusat oleh-oleh dan kuliner, sedangkan *cold storage* (CS) yang dimiliki hanya digunakan untuk menyimpan bahan baku untuk restoran dan pemasaran lokal, dan sebagian ruangan CS disewakan kepada UPI lain terutama saat bahan baku melimpah.



Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

4. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik Pada Direktorat Usaha dan Investasi
 Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik dengan materi ISO 9001:2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi serta perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP melalui *awareness training* dan interpretasi tentang Sistem Jaminan Mutu dan Sistem Manajemen Anti Panyuapan.



Gambar 3.14 Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik Pada Direktorat Usaha dan Investasi

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah Rp655.000.000,-, Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp501.239.643,- atau setara dengan 76,53%% dari alokasi anggaran.

iii. Sasaran Strategis 5

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan

IK6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada tahun 2023 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

Tabel 3.7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan III 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
6	Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya	6	35	6	100	45,71	90

Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2023 sebanyak 35 lembaga. Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan III tahun 2023 mencapai 6 lembaga usaha atau tercapai 100% terhadap target triwulan III 2023. Secara akumulatif, capaian kinerja lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan kapasitasnya sampai dengan triwulan III sebanyak 16 lembaga usaha atau setara 45,71% terhadap target 2023. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian triwulan III tahun 2022 yaitu 18 lembaga usaha atau setara 90% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 lembaga usaha.

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada triwulan III, antara lain:

1. Pendampingan Puspita di Kabupaten Rembang

Pada tanggal 26-28 Juli 2023 telah dilasanakan peresmian Rumah Puspita Rembang melalui penyerahan secara simbolis Rumah Puspita kepada pengelola yaitu Koperasi Mitra Mina Lestari. Koperasi tersebut juga menjadi penerima bantuan chest freezer dari Ditjen PDSKP, yang akan digunakan untuk memasarkan produk segar atau beku. Untuk mendukung kegiatan pemasaran, dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pengelola Rumah Puspita dengan BUMDES Samudera Jaya terkait kemitraan pemasaran produk Ikan Asap dari kelompok pengolah di Sarangmeduro untuk dipasarkan di Rumah Puspita.



Gambar 3.15 Pendampingan Puspita di Kabupaten Rembang

2. Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha dan investasi di lokasi modelling Kampung Nelayan Maju (kalaju) di kota Bandar Lampung pada 17 Juli 2023. Identifikasi dilakukan terhadap proses bisnis usaha pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran dan kebutuhan modeling rencana pengelolaan kawasan pengolahan ikan di Kalaju. Sarana dan prasarana yang akan dibangun di Kalaju sebagai berikut:
 - Hulu : Dermaga, SPBU, bengkel kapal dan *docking*.
 - Hilir : *Coldstorage*, Gudang Kering, kiosk pemasaran, alat angkut roda 3
 - Fasilitas Umum : Perbaikan jalan menuju dermaga

Untuk mengelola fasilitas tersebut secara terpadu diperlukan kelembagaan dan model bisnis yang terintegrasi hulu dan hilir. Saat ini terdapat Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari di Pulau Pasaran yang berdiri sejak tahun 2011, namun koperasi tidak operasional semenjak pergantian pengurus pada tahun 2019. Untuk itu, perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas koperasi untuk mengaktifkan kembali Koperasi tersebut, baik tata kelola maupun SDM pengurus koperasi.



Gambar 3.16 Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha di Kota Bandar Lampung

3. Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kota Surakarta pada tanggal 9-13 Agustus 2023. Kegiatan pendampingan kepada UMKM dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan UMKM Expo dengan tema "Transformasi UMKM di Masa Depan". Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koperasi dan UMKM, yang didampingi oleh Walikota Surakarta. Dalam expo tersebut, UMKM yang berasal dari Puspita Karanganyar dan Puspita Rembang turut berpartisipasi menampilkan produk olahan hasil perikanan dan mencatatkan transaksi penjualan produknya sebesar Rp10.240.000,-



Gambar 3.17 Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kota Surakarta

4. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha hasil KP di Kabupaten Wakatobi pada 21-24 Agustus 2023. Pendampingan dilakukan dengan identifikasi proses bisnis usaha Rumput Laut di Wakatobi, pertemuan dengan Pemerintah Daerah Wakatobi, dan Koperasi Selat Sempo, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pembudidaya Satuhati

Kelompok terdiri atas 12 anggota pembudidaya rumput laut dengan volume produksi sebesar 15 ton (*Eucheuma cottonii*) dan 17,6 ton (spinosum) pada tahun 2022. Kendala yang dialami kelompok untuk meningkatkan volume produksi adalah kurangnya permodalan, sulit untuk mendapatkan bibit yang berkualitas (bibit dari Baubau), dan teknis budidaya masih tradisional. Kebutuhan kelompok untuk meningkatkan usahanya adalah penyediaan sarana angkutan laut untuk panen rumput laut dan pembelian bibit ke Baubau, permodalan untuk meningkatkan volume produksi, pelatihan teknis budidaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk, dan pelatihan tata kelola usaha secara berkelompok.
 - b. Pengumpul Rumput Laut

Pengumpul membeli rumput laut kering dari para pembudidaya di Wangi-wangi Selatan. Rumput laut kering dibeli secara tunai dari para pembudidaya dan dikumpulkan menggunakan truk ekspidisi untuk dibawa ke Baubau dan Makassar.
 - c. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Wakatobi dan Koperasi Selat Sempo diadakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada 23 Agustus 2023, dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Wakatobi. Pertemuan bertujuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Direktur Jenderal PDSPKP ke Kabupaten Wakatobi pada bulan Juli 2023, yaitu meningkatkan kapasitas Kelembagaan pengelola Modeling Hilirisasi usaha rumput laut di Wakatobi. Pengelola Modeling adalah Koperasi Perikanan Selat Sempo yang beranggotakan 14 orang dan berdiri pada Maret 2023. Pada pertemuan tersebut telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Ditjen PDSPKP, Pemerintah Daerah Wakatobi, BLU LPUMKP, dan Koperasi Selat Sempo untuk meningkatkan kapasitas koperasi pengelola kesiapan pengelola dan kesiapan untuk mengelola modeling usaha rumput laut tersebut.
 - d. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan: 1) Monitoring dan evaluasi sesuai kesepakatan pada Nota Kesepahaman; 2) Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Wakatobi melakukan pendampingan kepada Koperasi Selat Sempo untuk kelengkapan administrasi koperasi dan penyusunan rencana bisnis; 3) BLU PMUKP melakukan analisa kebutuhan permodalan yang akan diajukan oleh Koperasi Selat Sempo.



Gambar 3.18 Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Hasil KP di Kabupaten wakatobi

5. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP pada 11 September 2023 di Kota Bandar Lampung. Kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nelayan dan masyarakat untuk pengolahan ikan teri kering yaitu garam, *sparepart* kapal, perbekalan, dan lainnya. Para anggota koperasi bersepakat akan menggunakan kemasan kardus berlabel koperasi dalam memasarkan produknya.



Gambar 3.19 Pendampingan Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP di Kota Bandar Lampung

Kalaju Pulau Pasaran direncanakan mendapatkan fasilitas Bantuan Pemerintah (BP) yang berasal dari Ditjen PDSPKP berupa sentra kuliiner, Gudang berpendingin, rumah pengering, dan kios nelayan. Oleh sebab itu, perlu disusun proses bisnis dan rencana usaha untuk mengelola fasilitas tersebut dan pengembangan usaha perikanan di Pulau Pasaran. Kendala yang dihadapi koperasi adalah masih ada anggota yang belum melakukan kewajiban membayar iuran pokok dan iuran wajib, perbedaan persepsi para anggota pada koperasi yang pernah didirikan sebelumnya, dan masih rendahnya pemahaman koperasi terkait tata cara pemasaran produk perikanan ke pasar luar negeri.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya: 1) Koperasi melaksanakan rapat anggota untuk membahas rencana usaha/bisnis terkait pengelolaan fasilitas Bantuan Pemerintah; 2) Rencana kegiatan bimbingan teknis pemasaran produk perikanan ke pasar luar negeri; 3) Kordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk pelatihan penyuluhan keamanan pangan; 4) Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM terkait perizinan berusahan untuk KBLI perdagangan besar hasil perikanan

6. Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha dan investasi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20-22 September 2023

Hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Koperasi Agar Makmur Sentosa, Kabupaten Sidoarjo

Pembentukan Koperasi difasilitasi oleh Direktorat Usaha dan Investasi pada Februari 2023, dengan bidang usaha pemasaran hasil rumput laut kering (*Gracilaria*) dari hasil kegiatan budidaya anggota koperasi yang berjumlah 80 orang. Koperasi juga telah mendapatkan General Administration of Custom of The Republic of China (GACC) Approval Number untuk rencana ekspor ke China. Selain itu juga telah memiliki SKP dan HACCP.

Saat ini Koperasi dalam proses finalisasi kerja sama kemitraan dengan perusahaan ULUU – Australia dengan ruang lingkup perdagangan (ekspor ke Australia sebesar 15 ton rumput laut kering). Perluasan dan revitalisasi tambak, pembangunan dua unit pabrik (tepung agar dan Bioplastic), pembangunan pabrik olahan rumput laut menjadi tepung.

Fungsi utama koperasi antara lain mengonsolidasikan produksi rumput laut anggota dan usaha koperasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku rumput laut serta penyediaan lahan untuk kebutuhan industri.

b. Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan, Kabupaten.Gresik

Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan yang terletak di Desa Srowo terdiri atas 47 pengolah kerupuk ikan dengan kapasitas produksi sebesar 1 ton/hari. Kebutuhan bahan baku ikan (kuniran dan lain-lain) sebesar 400-450 kg/hari.

Desa Srowo memiliki Bumdes Pahala Srowo yang usahanya juga mendukung para pelaku pengolah kerupuk ikan, diantaranya pemasaran dan penyediaan gas elpiji (3 kg). Bumdes sedang membangun rumah produksi bagi para pelaku usaha pengolah kerupuk, yang memiliki kapasitas untuk 50 pelaku usaha. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran dari Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Daerah.

Perlu diidentifikasi usaha koperasi yang akan dibentuk agar dapat berkolaborasi dengan Bumdes untuk memenuhi kebutuhan para pengolah ikan di Desa Srowo. Kendala yang dialami adalah para pengolah masih belum melakukan pencatatan/pembukuan usahanya.

c. Gapokhlasar Ayu, Kabupaten Sidoarjo

Gabungan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Gapokhlasar) Ayu terdiri atas 5 kelompok pengolah ikan, yang melakukan produksi sebagian besar berbahan baku ikan seperti kerupuk ikan, abon ikan, kerupuk kulit ikan, stik rumput laut, dan lain-lain. Pemasaran produk saat ini hanya dilokal Kab. Sidoarjo.

Gapokhlasar secara rutin telah melakukan pertemuan bulanan, pengumpulan uang kas, dan pelatihan pengembangan produk. Namun untuk usaha masih dilakukan secara individu, baik berupa penyediaan kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Rencana pengembangan usaha adalah melakukan pemasaran bersama hasil produksi anggota.

Kendala yang dialami adalah Akses pasar yang terbatas serta desain kemasan dan spesifikasi produk yang belum inovatif. Para anggota Gapokhlasar sangat antusias atas rencana pembentukan koperasi dan selama ini para anggota sudah melaksanakan kewajiban simpanan rutin bulanan untuk operasionalisasi kelompok. Dinas Perikanan Kota Sidoarjo dan Jawa Timur akan memfasilitasi hal-hal administratif pembentukan koperasi dan perijinan berusaha.

- d. Tindak Lanjut yang perlu diantaranya: 1) Pembuatan bahan publikasi “*Success Story* Penguatan Kelembagaan Usaha”; 2) Pendampingan pada kerja sama investasi Koperasi Agar Makmur Sentosa dengan ULUU – Australia; 3) Pendampingan pendirian koperasi pada Sentra Pengolahan Ikan, Kabupaten Gresik dan Pokhlasar Ayu, Kabupaten Sidoarjo bersama TPU KP; 4) Harmonisasi kewenangan pemberdayaan Bumdes dan Koperasi sebagai aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa yang melibatkan KKP, Kemendes dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan UMKM.



Gambar 3.20 Identifikasi dan sosialisasi kebutuhan lembaga usaha dan investasi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp781.000.000,-, Realisasi anggaran triwulan III sebesar Rp570.487.315,- atau setara dengan 73,05% dari total anggaran.

IK7. Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diperlukan strategi pelaksanaan arah kebijakan diantaranya adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan, industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan yang diintegrasikan hulu – hilir dalam model sebuah Klaster Daya Saing.

Klaster daya saing ini merupakan kumpulan dari berbagai unit usaha kelautan dan perikanan yang berhubungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan difasilitasi program pengembangan usaha agar memiliki daya saing SDM, produk, dan perusahaan, serta mampu mengangkat daya saing daerah dan nasional. Klaster daya saing merupakan salah satu model kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN dan berkelanjutan usaha pada usaha sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dilaksanakannya Klaster Daya Saing adalah untuk penguatan daya saing di suatu kawasan tertentu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dan/atau pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Tabel 3.8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan III 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	-	3	1	-	33,33	-

Pada tahun 2023 kegiatan Klaster Daya Saing terdiri atas pembentukan lembaga klaster daya saing dan pengembangan lembaga klaster daya saing. Lembaga klaster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola kawasan klaster daya saing di lokasi tertentu. Target lembaga usaha yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3 lembaga. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan III, hal ini dikarenakan penilaian terhadap Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Namun pada triwulan III telah terrealisasi 1 lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut telah dilaksanakan yaitu:

1. Rapat Koordinasi Percepatan dan Implementasi Klaster Daya Saing (KDS) pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Lembaga yang akan dibentuk di KDS berfungsi sebagai forum komunikasi atau agen perubahan yang memiliki peran sebagai penghubung komunikasi dari seluruh stakeholder. Sebaiknya lembaga tersebut beranggotakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, LSM, dan asosiasi.
 - b. Penentuan lokasi sebaiknya ditentukan pada lokasi budidaya telah berjalan proses bisnisnya, dan dikembangkan dengan melakukan pendekatan analisis rantai pasok (interaksi bisnis).
 - c. Tindak lanjut : 1) Pembentukan lembaga klaster sebagai forum komunikasi di dua lokasi; 2) Peran koperasi yang sudah dibentuk di lokasi KDS saat ini masih minim, oleh karena itu perlu ditingkatkan perannya dalam mengembangkan usaha KDS; 3) Setiap lokasi KDS memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari segi komoditas, lokasi dan teknologi yang digunakan, sehingga perlu informasi keragaan yang lengkap untuk menyusun SOP di setiap wilayah; 4) Perlunya sinergitas antara Unit eselon 2 lingkup PDS, sehingga kegiatan KDS dapat menjadi produk unggulan KDS
2. Rapat Pembahasan Pedoman Umum dan Rencana Aksi Pengembangan KDS di Bogor pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Penetapan lokasi KDS sebelumnya hanya berdasarkan rekomendasi, oleh karena itu perlu dibentuk pedoman umum (pedum) sebagai acuan dalam mengembangkan KDS.
 - b. Beberapa hal yang dibahas yaitu tahapan usulan lokasi KDS, kriteria penetapan dan metode seleksi lokasi, pembentukan tim teknis, forum komunikasi, dan lembaga pengelola klaster, serta penetapan lokasi KDS.
 - c. Tindak lanjut: 1) Identifikasi masalah di lokasi KDS; 2) Pemetaan tokoh kunci untuk forum komunikasi KDS yang potensial atau memiliki peran besar, seperti pelaku usaha, distributor dan supplier utama; 3) Pembuatan SK Tim Teknis; 4) Penyempurnaan pedum; 5) Penentuan lokasi KDS di tahun 2024; dan 6) Pembentukan lembaga di Konawe Selatan dan Sambas.

3. Rencana pengembangan kelembagaan KDS di Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan pada tanggal 13 September 2023, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Pembudidaya berharap dapat melakukan studi banding di tambak intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, dan melakukan uji coba di salah satu tambak. Koperasi Padaidi Sitto Jaya siap menyiapkan lahan budidaya untuk dijadikan *pilot project* tambak intensif.
 - b. Saat ini benih udang berasal dari Makassar dan Kendari, sedangkan benur bandeng berasal dari Bali. Benur yang berasal dari Bali memiliki SR yang lebih tinggi dibandingkan benur yang berasal dari Makassar. Ada kemungkinan benur yang diambil dari Makassar dicampur umurnya (PL) sehingga mortalitas udang cukup tinggi.
 - c. Rencananya koperasi yang akan bergabung dalam lembaga KDS terdiri atas 6 koperasi, yaitu Koperasi Salo Raya, Nur Rezki Hidayah, Padaidi Sitto Jaya, Samaturu Sumber Rezeki, Tambak Nusantara, dan Purnama Jaya Mandiri.
4. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan KDS di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 14 September 2023, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. FGD dibuka oleh Kepala Dinas KP Kabupaten Konawe Selatan dan dihadiri oleh DKP Kab. Konawe Selatan, Dit. Usaha dan Investasi, Perguruan Tinggi, PT. Regens, Benurkita, eFishery, penyuluh, TPUKP dan ketua koperasi pembudidaya di sekitar Desa Tinanggea. Peserta rapat bersepakat untuk bergabung dalam Forum Komunikasi KDS di Kab. Konawe Selatan
 - b. Tindak lanjut: 1) Memperkuat koperasi yang sudah ada, salah satunya dengan pelatihan manajemen dan pengelolaan koperasi; 2) Menetapkan kawasan KDS; 3) Melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik dan Dinas PUPR terkait irigasi; 3) Melakukan legalisasi tata ruang yang jelas sebagai kawasan budidaya; 4) Perguruan Tinggi akan mengerahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian di kawasan KDS dan menjadikan Kab. Konawe Selatan sebagai pilot project; 5) Mengadakan rapat tim teknis untuk evaluasi permasalahan serta program dan kegiatan KDS tahun 2024 di Konawe Selatan.



Gambar 3.21 Dokumentasi Kegiatan FGD Kluster Daya Saing di Konawe Selatan

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp595.000.000,- hingga triwulan III anggaran yang terserap adalah sebesar Rp214.378.427,- atau setara dengan 36,03% dari total anggaran.

iv. Sasaran Strategis 6

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha

IK8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 585 wirausaha. Pada triwulan III tahun 2023 target yang ditetapkan sebanyak 170 UMKM/wirausaha dan realisasi capaian pada TW III yaitu sebanyak 170 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 100% terhadap target. Secara akumulatif, capaian wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina

sampai dengan triwulan III mencapai 350 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 59,82% terhadap target tahun 2023 sebanyak 585 UMKM/Wirausaha. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 yang mencapai 100,57 persen, maka capaian triwulan III tahun 2023 masih rendah dikarenakan adanya penyesuaian anggaran.

Tabel 3.9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
8	Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	170	585	170	100	59,82	100,57

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III 2023, meliputi:

1. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha peserta penciptaan wirausaha baru tahun 2023 dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta analisis kebutuhan usaha. Kegiatan Prausaha ini berlangsung kurang lebih selama 70 hari (30 Mei – 7 Agustus 2023) meliputi kurasi peserta hingga selesainya penyampaian materi kegiatan ini, yang melibatkan 100 peserta terpilih dan lolos kurasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP bekerja sama dengan GoUKM Training Center dalam pelaksanaan kegiatan Prausaha. Pendampingan dan monitoring peserta pasca pelatihan tetap dilakukan hingga saat ini, melalui pengisian kuisisioner, pendampingan dalam pembuatan izin usaha NIB, serta penyebaran data melalui dinas-dinas terkait untuk proses pemantauan.



Gambar 3.22 Dokumentasi Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru 2023

2. Kegiatan penjaringan minat, identifikasi kebutuhan usaha dan penciptaan wirausaha dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Pasaran, Propinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dan kebutuhan usaha yang diperlukan oleh wirausaha, sehingga dapat tergambarkan pembinaan dan pendampingan yang dibutuhkan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi kewirausahaan dan penciptaan wirausaha, dengan tujuan penumbuhan minat wirausaha kelautan dan perikanan di Pulau Pasaran Provinsi Lampung, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi perizinan berusaha (NIB), sosialisasi pembiayaan LPMUKP, penguatan manajemen usaha mikro dan kecil serta diversifikasi produk olahan hasil perikanan.



Gambar 3.23 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan dan Penciptaan Wirausaha

3. Pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha pengolahan perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan yang telah dilakukan di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pendukung program hilirisasi Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di Pulau Pasaran dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam bidang kewirausahaan dan akses pembiayaan.



Gambar 3.24 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Dan Akses Permodalan di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung

4. Monitoring dan evaluasi wirausaha dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pengolahan perikanan yang telah diberikan pembinaan dan pendampingan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pemula terkait keterbatasan modal termasuk peralatan untuk membangun usaha, legalitas produk, kemasan yang masih sederhana, serta lemahnya manajemen/pengelolaan usaha. Adapun terkait legalitas produk, wirausaha dapat secara aktif menghubungi dinas teknis yang menangani, seperti Dinas Kesehatan untuk pengurusan PIRT. Terkait pengelolaan usaha, wirausaha telah dibina untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana, melakukan pencatatan stok produk dan bahan baku, dan sebagainya.



Gambar 3.25 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan evaluasi wirausaha

5. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Cilacap, Halmahera Tengah, Tulungagung, Purbalingga, Temanggung, Maluku Tengah, Bogor, Garut,

Kabupaten Pati dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga Keuangan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaku usaha yang hadir terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan. Pada kegiatan bimtek ini, KKP juga bekerja sama dengan DPMPTSP mengadakan gerai layanan perizinan berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta perwakilan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terkait pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Narasumber yang hadir berasal dari lembaga keuangan perbankan (BRI dan BNI) dalam rangka sosialisasi akses pembiayaan usaha; serta narasumber praktisi manajemen/UMKM teladan/wirausaha mapan yang menyampaikan materi terkait manajemen usaha mikro kecil, *success story*, motivasi kepada calon wirausaha kelautan dan perikanan.



Gambar 3.26 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Kabupaten Tulungagung

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp6.675.000.000,-, realisasi anggaran triwulan III sebesar Rp3.415.295.456,- atau setara dengan 51,17% dari total anggaran.

IK9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit program adalah jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Tabel 3.10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
9	UMKM Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (UMKM)	150	500	180	120	66,80	-

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada triwulan III tahun 2023 adalah 180 UMKM. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan III tahun 2023 sebanyak 150 UMKM, Secara akumulatif, capaian kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 334 UMKM atau setara 66,8% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 500 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitasi akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program pada triwulan III tahun 2023 antara lain:

1. Terlaksananya Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Kebumen dan Rembang Kegiatan ini merupakan sinergi Direktorat Usaha dan Investasi dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kebumen dan Rembang agar dapat naik kelas melalui pemenuhan perizinan berusaha, akses permodalan, dan peningkatan kualitas produk melalui pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sesuai dengan tema kegiatan "Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan siap naik kelas". Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Kebumen

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dihadiri oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan secara daring, Direktur Usaha dan Investasi, Direktur Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan Perikanan Kabupaten Kebumen, Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Kebumen, Kepala Sekolah SMKN 1 Puring dan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta peserta sebanyak 100 UMKM terdiri atas 50 pengolah dan pemasar, 25 nelayan dan 25 pembudidaya.

Materi edukasi yg disampaikan para narasumber meliputi: a) Literasi Keuangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPK BKK) Kebumen; b) Perizinan berusaha oleh Direktorat Usaha dan Investasi; c) Pentingnya SKP dalam menjamin keamanan produk oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan fasilitasi Pembiayaan di Kebumen

Pada kegiatan Gerai Layanan Terpadu Ditjen PDSPKP, hasil yang dicapai meliputi: a) Terfasilitasinya pembiayaan kepada 3 UMKM senilai Rp125 juta oleh Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Kebumen dan telah diserahkan secara simbolis; b) Penerbitan NIB bagi 3 UMKM dan konsultasi

- c) Penandatanganan kerja sama pemasaran produk olahan antara Bumdes Sarangmeduro dan Koperasi Mina Mitra Lestari.
2. Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi akses pembiayaan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 18-20 September 2023. Kegiatan bertujuan untuk menggali informasi lokasi potensial untuk pengembangan klaster-klaster pembiayaan di Kabupaten/kota yang menjadi target atau prioritas, khususnya Kabupaten Pekalongan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila Salin. Adapun informasi yang diidentifikasi meliputi komoditas unggulan, potensi dan sebaran pelaku usaha sektor KP, jenis usaha eksisting, permasalahan serta kendala yang dihadapi, potensi akses pembiayaan yang tersedia, dan dokumentasi Lokasi. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan dan koordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya dan Kepala Cabang PT. PNM Cabang Tegal beserta tim, terkait persiapan pelaksanaan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Pekalongan. Hasil kunjungan tersebut menetapkan lokasi pertemuan di aula Kantor Kecamatan Wonokerto, jumlah peserta sebanyak 100 pelaku usaha perikanan, penyerahan simbolis sertifikat pengolahan dan perijinan, materi edukasi tentang pembiayaan dan perijinan, serta pembukaan gerai layanan konsultasi dan pembiayaan.



Gambar 3.29 Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Debitur Potensial di Kabupaten Pekalongan

Tindak lanjut hasil identifikasi adalah pelaksanaan fasilitasi askes pembiayaan yang diagendakan pada bulan Oktober 2023, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas UMKM di Kabupaten Pekalongan agar dapat naik kelas melalui pemenuhan perizinan berusaha (NIB), akses permodalan, dan peningkatan kualitas produk (SKP).

3. Terlaksananya rapat Pokja Kredit Program Sektor KP pada 25 Juli 2023, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Anggota Pokja menyampaikan realisasi pembiayaan usaha di sektor KP dan program/kegiatan yang dapat disinergikan untuk mendukung program prioritas KKP.
 - b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan Kartu Kusuka agar dapat menjadi alat transaksi keuangan untuk memudahkan UMKM mendapatkan akses KUR.
 - c. Masing-masing perbankan memiliki program pembiayaan berbasis kluster atau kampung yang dapat disinergikan dengan program prioritas KKP yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Untuk itu, Ditjen PDSPKP akan menjajaki pelaksanaan *pilot project* kluster pembiayaan usaha bersama perbankan di lokus prioritas.
 - d. KKP berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait akses dan mekanisme upload data UMKM binaan kedalam SIKP
4. Terlaksananya rapat pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PDSPKP dengan PT.PNM. Ruang lingkup kerja sama meliputi fasilitasi skema pembiayaan, pendampingan teknis dan manajerial, pertukaran data dan informasi, serta sinergi kemitraan. Rancangan PKS dimaksud telah disampaikan kepada Setditjen PDSPKP untuk diproses lebih lanjut.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp536.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp467.716.375,- atau setara dengan 87,26% dari total anggaran.

IK10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela)

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela oleh TPUKP meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan,

- (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan.

Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan oleh TPUKP untuk mengakses pembiayaan pada periode berjalan, baik pendampingan fasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses pembiayaan, penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

Tabel 3.11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) pada Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
10	UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) (UMKM)	650	2.135	707	108,7	66,27	-

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi melalui Gisela sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 707 UMKM. Capaian ini setara dengan 108,7% terhadap target triwulan III tahun 2023 sebanyak 650 UMKM, atau setara 66,27% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 2.135 UMKM. Secara akumulatif, realisasi UMKM yang difasilitasi melalui Gisela sampai dengan triwulan III, telah mencapai 1.415 UMKM yang terdiri atas 690 pelaku usaha terfasilitasi pembiayaan dengan realisasi kredit sebesar Rp28,98 milyar dan 292 UMKM pengolahan yang mendapatkan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha), serta 433 UMKM yang terfasilitasi layanan berusaha. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, karena penghitungan indikator kinerja yang berbeda. Realisasi jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, selain menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan (realisasi akad kredit), namun mencakup UMKM yang didampingi untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha), penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan III untuk mendorong tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Terlaksananya koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BNI pada tanggal 25 Juli 2023, Bank BRI pada tanggal 25 Agustus 2023, dan PT. PNM pada tanggal 23 Agustus 2023, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data Kartu Pelaku Usaha KP (Kusuka). Adapun hal-hal yang dibahas adalah sinergi kegiatan pengembangan klusterisasi usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemitraan, yang didukung dengan penyediaan akses pembiayaan dan edukasi bagi UMKM binaan Ditjen PDS yang siap ekspor.
2. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TPUKP secara luring dan daring pada tanggal 10 – 13 Agustus 2023 di Kota Solo, Jawa Tengah. Tujuan pelaksanaan Rakernis adalah dalam rangka evaluasi kinerja TPUKP semester I dan perencanaan kegiatan semester II 2023, serta peningkatan pemahaman TPUKP tentang program prioritas KKP dan *softskill* tentang *Business Model Canvas*. Rakernis dihadiri oleh peserta sebanyak 40 orang TPUKP secara luring dan 41 orang secara daring. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PDSPKP hadir memberikan arahan terkait tugas TPUKP dalam mendukung program dan kegiatan Ditjen PDSPKP.



Gambar 3.30 Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja Teknis TPUKP

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi Dan Layanan Usaha (Gisela) pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.573.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp2.129.908.511,- atau setara dengan 59,61% dari total anggaran.

IK11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

Tabel 3.12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan III tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usahadan investasi hulu hilir (UMKM)	25	84	26	104	72,61	-

Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir hingga Triwulan III tahun 2023 mencapai 26 UMKM yang telah memiliki sertifikat PIRT atau setara 104% terhadap target triwulan III sebanyak 25 UMKM. Secara akumulatif, capaian indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan III sebanyak 61 UMKM atau setara 72,61% terhadap target tahun 2023 sebanyak 84 UMKM. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 yang mencapai 120 persen, maka capaian triwulan III tahun 2023 masih rendah dikarenakan adanya penyesuaian anggaran.

Fasilitasi kemitraan juga dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan sertifikat PIRT, yang diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran ke retail modern

dan meningkatkan nilai kepercayaan konsumen akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk UMKM. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Berkontribusi pada kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan “UMKM KP Siap Naik Kelas” yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Bumdes Sarangmeduro dan Koperasi Mitra Mina Lestari. Ruang lingkup kerja sama yaitu pemasaran produk perikanan berupa ikan asap secara berkelanjutan oleh Koperasi Mitra Mina Lestari selaku pengelola Rumah Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan Terpadu (Puspita) di Kabupaten Rembang.



Gambar 3.31 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Pengolah dan Pemasar Produk Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang

2. Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi dengan Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP di Bekasi. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman tentang kemitraan usaha kepada para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bekasi, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, pola-pola kemitraan dan manfaat kemitraan, serta fasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman kemitraan usaha antar pelaku usaha.

Capaian kegiatan kemitraan usaha ini sebagai berikut:

- a. Kerja sama pengembangan bisnis *frozen food* (Tekwan Cup Single Layer dan Otak-otak bakar) antara Dapur Sauja di Bekasi dengan PT. Reska Multi Usaha di Manggarai Utara, Jakarta, dengan jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya.
- b. Kerja sama antara Koperasi Hidayatullah (Babelan, Bekasi) yang memproduksi Bandeng Presto dengan Pesantren Darul Qur'an Putri (Desa Ciantra, Cikarang

Selatan) sebagai pembeli Bandeng Presto dalam jangka waktu 2 tahun sejak ditandatangani.

3. Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha pada kegiatan FGD Pengembangan Kluster Daya Saing di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 14 September 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala DKP Kabupaten Konawe Selatan dan dihadiri perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi, perguruan tinggi, PT. Regens, Benurkita, eFishery, penyuluh, TPUKP, dan ketua koperasi pembudidaya di sekitar Desa Tinanggea. Pada kesempatan yang sama telah ditandatangani kemitraan antara PT. Benur Top dengan Koperasi Salo Raya, Nur Rezki Hidayah, Padaidi Sitto Jaya, dan Purnama Jaya Mandiri dengan ruang lingkup kerja sama terkait penyediaan benur bagi petambak.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp804.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp486.666.684,- atau setara dengan 60,53% dari total anggaran.

IK12. *Startup* millenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi

Startup Milenial yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah *startup* yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikelola oleh generasi milenial. *Startup* di sektor kelautan dan perikanan bergerak dalam berbagai ragam inovasi, yakni Fintech, Nanobubble, *Autofeeder*, Internet of Things (IoT) Tambak, *E-Commerce*, *Marketplace*, *Portable Pond*, dan *Water Quality Equipment*. Pembinaan *startup* sektor kelautan dan perikanan dalam rangkaian kegiatan Pengembangan *Startup* Millenial sebagian besar akan diarahkan untuk mendukung pembangunan Kampung Budidaya Perikanan, Kampung Nelayan Maju, dan lokasi perikanan strategis, melalui melalui fasilitasi kemitraan, implementasi inovasi teknologi beserta pendampingan teknis peningkatan produksi, akses distribusi/logistik, pemanfaatan fitur fintech, serta pemasaran berbasis teknologi modern untuk pelaku usaha skala UMKM di wilayah tersebut.

Indikator kinerja *startup* milenial adalah dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan. Target jumlah pelaku usaha *startup* milenial merupakan UMKM yang terdiri atas *startup* milenial yang bersangkutan dan pelaku usaha mitra *startup*.

Tabel 3.13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja *Startup* Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
12	Startup Milenial (UMKM)	-	8	2	-	25	-

Pada tahun 2023, kegiatan pengembangan *startup* milenial ditargetkan sebanyak 8 UMKM. Realisasi capaian kinerja pada triwulan III tahun 2023 adalah 1 UMKM, dan secara akumulatif sampai dengan triwulan III telah tercapai 2 UMKM atau setara 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 8 UMKM. Rendahnya capaian sampai dengan triwulan III sangat berkaitan dengan adanya penyesuaian anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut pada triwulan III, antara lain:

1. Kegiatan identifikasi dan verifikasi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran pemasaran di Provinsi Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kampung Sebatuan Kabupaten Sambas telah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan budidaya ikan bandeng di Kampung Sebatuan dan menjadikannya sebagai kampung percontohan bagi kampung-kampung perikanan budidaya lainnya. Di Kampung Sebatuan terdapat 100 kelompok pembudidaya ikan bandeng dengan jumlah anggota sebanyak 2.000 orang. Keberhasilan budidaya ikan bandeng di Kampung Sebatuan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
 - b. Kelompok Pembudidaya dan Pemasar Arwana Simacho di Kota Pontianak berdiri sejak tahun 2005, dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 20 orang. Kelompok Arwana Simacho telah menjadi salah satu kelompok pembudidaya arwana simacho yang berhasil, dimana pemasaran ikan arwana mencapai 100 ekor/bulan dengan jumlah permintaan 200 ekor/bulan. Lokasi budidayanya

sendiri berada di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Mempawah.



Gambar 3.32 Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Kota Pontianak

- c. Kegiatan identifikasi dan verifikasi UMKM calon mitra startup dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring UMKM di wilayah Jabodetabek yang memiliki potensi untuk menjadi mitra startup Pitupangan dalam rangka kerja sama bisnis dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Terdapat 3 (tiga) UMKM calon mitra startup, yaitu Abon Ikan Kampung Aquarium Jakarta, Arby Bandeng Presto Jakarta, dan Tahu Bakso Ikan Nasa Boga Bogor, yang kedepannya diharapkan dapat bekerja sama dengan startup Pitupangan.



Gambar 3.33 Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Jakarta dan Jawa Barat

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja startup milenial pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp500.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp205.175.574,- atau setara dengan 41,04% dari total anggaran.

v. Sasaran Strategis 7

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

IK13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi.

Pada tahun 2023, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 4.794 orang. Capaian ini belum dapat dihitung pada triwulan III, karena periode pelaporan untuk indikator kinerja ini memiliki periode tahunan.

Tabel 3.14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW III	TA 2023		TW III 2023	Tahun 2023	
13	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	-	4.794	-	-	-	-

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan; dan
3. Fasilitasi dan pembinaan Wirausaha, Gisela, Kemitraan Usaha dan Startup Millennial bagi UMKM KP di lokasi-lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

vi. **Sasaran Strategis 8**

Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

IK14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 3.15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Terhadap Target (%)
14	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 3.16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	TW III	Capaian TW III	% thd Target 2023
15	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	-	-	-

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi) tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

IK16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan rewiu laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Tabel 3.17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	-	-

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi KinerjaKUP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Keikutsertaan pada kegiatan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks cascading lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 3 Juli 2023;
- b. Keikutsertaan pada kegiatan Pembahasan revisi renstra dan pohon kinerja tematik pada tanggal 13 Juli 2023;
- c. Keikutsertaan pada kegiatan revisi Rencana Strategis (Renstra) serta adanya rencana penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023. Kegiatan dimaksud melibatkan Biro perencanaan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian PPN/Bappenas;
- d. Keikutsertaan pada kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan;

- e. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP dan serta stakeholders terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
- f. Keikutsertaan pada kegiatan verifikasi dan validasi PM SAKIP level II yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 24-25 Juli 2023 di Bogor.

IK17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase)	≤ 0,5	-	-

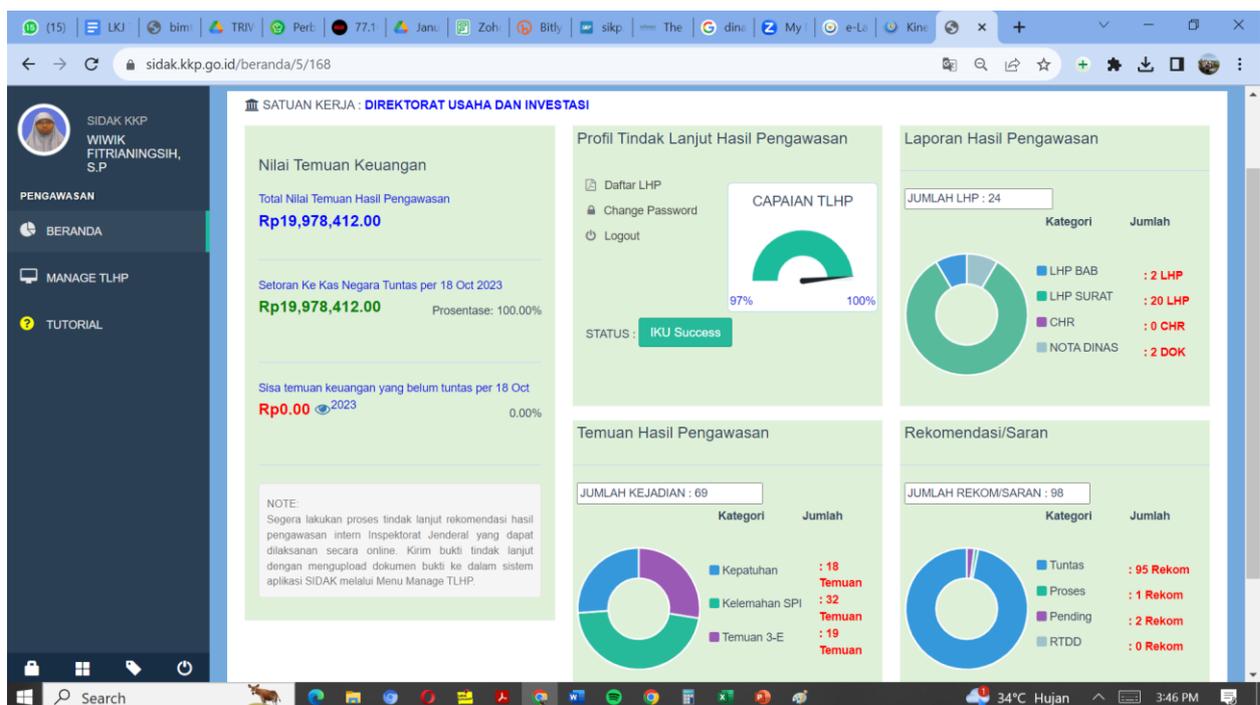
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

IK18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan. Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III 2023 mencapai 97%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi.

Tabel 3.19. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
		2023	TW III	Capaian TW III	% thd Target TW III	% thd Target 2023
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	97	129,33	129,33



Gambar 3.34 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 20 Juli 2023

Berdasarkan memorandum Nomor 3442/DJPDSPKP.0/RC.610/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Hasil Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian catatan 95 rekomendasi tuntas, 1 rekomendasi proses, dan 2 rekomendasi pending.

IK19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Dalam upaya penerapan inovasi tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan sistem perizinan berusaha pengolahan ikan dilaksanakan berbasis risiko, post audit untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar, dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS), disingkat SI IKAN BERPROTEIN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Tahun 2022. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan kembali inovasi pelayanan publik SI IKAN BERPROTEIN untuk berkompetisi agar mendapatkan peringkat 99 terbesar, dan juga kegiatan Gisela sebagai salah satu inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Capaian kinerja ini belum dapat diukur, karena baru akan diperhitungkan pada akhir tahun.

IK20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Indikator kinerja ini merupakan indikator kedelapan yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan III Tahun 2023, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang

menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.20 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
		2023	TW III	Capaian TW III	% thd Target TW III	% thd Target 2023
19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	92	92	133,33	114,92	114,92

Pada triwulan III tahun 2023, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 133,33% atau setara dengan 114,92% terhadap target triwulan III tahun 2023 sebesar 92%. Capaian tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 100% namun nilai target yang ditetapkan terdapat perbedaan yaitu pada tahun 2022 persentase capaian terhadap target sebesar 116,28% dengan target 86.

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan tingkat keaktifan eselon II Direktorat Usaha dan Investasi dalam melakukan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun pengisian Manajemen Pengetahuan di Portal Coofis.

IK21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3.21 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
20	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	-	-

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 95%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

IK22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3.22 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

IK23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.23 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan

Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan III tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2023. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat usaha dan investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Dalam penyusunan peluang investasi *ready to offer* untuk mendukung pengembangan bidang hilir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan, koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Sulawesi

Tenggara dan Pemkab Wakatobi, sinergitas dengan Direktorat Teknis lain lingkup Ditjen PDSPKP untuk pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklahsar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Wakatobi.

2. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;
3. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Pekalongan
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Kelautan terkait database pelaku usaha kelautan dan perikanan di aplikasi SIKP dan data kredit sektor kelautan dan perikanan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan.

4.3. Tindak lanjut atas rekomendasi triwulan II

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan II 2023, sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi Kegiatan FGD pada tanggal 16 September 2023. Tujuan FGD untuk menggali masukan dan saran dari para stakeholder terkait model bisnis hilirisasi rumput laut dan pengayaan data dan informasi untuk penyusunan peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Wakatobi.
2. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan selama periode triwulan III di Kabupaten Rembang. Tujuan dari sosialisasi ini adalah: (a) Menambah wawasan bagi pelaku usaha atau *stakeholder*, antara lain Unit Pengolah Ikan, Pemerintah, petugas pelayanan pemerintah, serta masyarakat umum terkait meningkatkan wawasan terkait Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021; (b) Memfungsikan PTSP Pusat dan Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan

informasi dan layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA untuk kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

3. Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Rembang, Kabupaten Bekasi dan Konawe Selatan dalam rangka monitoring, pendampingan, dan koordinasi yang lebih intensif kepada para pelaku usaha, untuk mengevaluasi perkembangan implementasi Kesepakatan Kerja sama kemitraan yang telah dilakukan,
4. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kebumen pada tanggal 11 Juli 2023 dan Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Juli 2023
5. Terlaksananya pembinaan, pendampingan, edukasi, sosialisasi dan monitoring kepada Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) secara berkala (setiap bulan) selama periode triwulan III 2023.
6. Terlaksananya rapat Pokja Kredit Program Sektor KP pada 25 Juli 2023 dengan hasil dengan hasil diantaranya masing-masing perbankan memiliki program pembiayaan berbasis kluster atau kampung yang dapat disinergikan dengan program prioritas KKP yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Untuk itu, Ditjen PDSPKP akan menjajaki pelaksanaan *pilot project* kluster pembiayaan usaha bersama perbankan di lokus prioritas.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
 LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
 Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Plt. Direktur Jenderal, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
 Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ishartini

PIHAK PERTAMA,
 Direktur Usaha dan Investasi

Catur Sarwanto

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
	2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2. Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3. Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4
3. Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35
	7. Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3
6. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/latau dibina (UMKM)	585
	9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500
	10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135
	11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84
	12. Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8
7. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	4.794
8. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
	15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
	17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤0,5
	18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75
	19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
	21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
	23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	20.450.000.000
Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023		20.450.000.000

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi



Ishartini



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan III

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
 Nomor 2132/DJPDSPKP.1/TU.140/X/2023

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
 Dari : Direktur Usaha dan Investasi
 Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan III Tahun 2023
 Lampiran : Satu berkas
 Tanggal : 16 Oktober 2023

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Peluang investasi yang ready to offer**
 Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas. Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah tercapai 1 (satu) dokumen atau mencapai 25,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 4 dokumen.
- Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan**
 Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan III tahun 2023 sebanyak 1 kegiatan, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah tercapai sebanyak 2 kegiatan atau tercapai 66,66% dari target tahun 2023.
- Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya**
 Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah mencapai 16 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan III tahun 2023 sebanyak 16 lembaga, atau setara dengan 45,71% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 35 lembaga.
- Lembaga Usaha Berbasis Kluster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya**
 Lembaga kluster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu

menggerakkan atau mengelola kawasan kluster daya saing di lokasi tertentu. Capaian pada triwulan III telah terealisasi 1 lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, atau setara 33,33% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 3 lembaga.

- Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina**
 Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 350 UKM/wirausaha atau setara 100 % jika dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan III sebanyak 350 UKM/wirausaha, atau setara dengan 59,82% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 585 UKM/Wirausaha.
- UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program**
 Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah 334 UMKM atau setara dengan 111,33% dibandingkan dengan target triwulan III sebanyak 300 UMKM, atau setara dengan 66,8% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 500 UMKM.
- UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)**
 Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan GISELA oleh TPUPK meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan, (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan. Realisasi jumlah UMKM yang terfasilitasi pada triwulan III tahun 2023 adalah 1415 UMKM, nilai ini setara dengan 113,2% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 1250 UMKM atau setara dengan 66,27% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 2135 UMKM.
- UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir**
 Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah 61 UMKM, nilai ini setara dengan 101,6% dari target sampai dengan triwulan III yakni 60 UMKM, atau setara dengan 72,71% Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 84 UMKM
- Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**
 Realisasi nilai persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan

Investasi pada triwulan III tahun 2023 adalah 97% melebihi dari target yang sudah ditentukan yakni 75%

10. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Realisasi nilai persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan III tahun 2023 adalah 133,33%, melebihi dari nilai persentase target yakni sebesar 92%.



Tembusan
 Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Bumi Kartini Mina di Jepara;
2. Koperasi Mino Mulyo Abadi di Pati;
3. Koperasi Agar Makmur Sentosa di Sidoarjo;
4. Koperasi Berkah Mekar Bersama di Karawang.
5. Koperasi Pemasaran Mina Usaha Rembulan di Kabupaten Sumbawa;
6. Koperasi Produsen Mari Makan Ikan di Kabupaten Bandung;
7. Koperasi Pemasaran Pijarmas Kabupaten Demak;
8. Koperasi Poklahsar Jaya Bersama di Kabupaten Gowa.
9. Koperasi Usaha Amanah Berkah di Kota Makassar;
10. Koperasi Mitra Pangan Nusantara di Kabupaten Gowa;
11. Koperasi Pemasaran Maharani Sejalan Sehati di Kabupaten Bandung;
12. Koperasi Perikanan Selat Sempo di Wakatobi
13. Koperasi Konsumen Abadi Guyub Bersama di Kabupaten Probolinggo.
14. Koperasi Mutiara Para Mitra Sejahtera di Kabupaten Bandung
15. Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran di Kota Bandar Lampung
16. Koperasi Konsumen Wono Mina Sari di Kabupaten Magelang

Lampiran 4.

Daftar User Sistem Manajemen Pengetahuan Direktorat Usaha dan Investasi
triwulan III Tahun 2023

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
Nomor: 2830/SJ.7/TU.210/IX/2023

Yth. : (Daftar Terlampir)
Dari : Ptt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Hal : Penyampaian Informasi Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Tanggal : 18 September 2023

Dalam rangka pelaksanaan IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan III Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan capaian IKU MP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan tanggal 18 September 2023.

Sehubungan dengan hal di atas, mengingat periode triwulan III tahun 2023 tersisa 12 hari kalender, mohon agar Saudara/i dapat meningkatkan pengisian MP di Portal Coofis.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik

Aulia Riza Farhan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Direktur Jenderal Penkangan Tangkap
3. Direktur Jenderal Penkangan Budi Daya
4. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Inspektur Jenderal
7. Kepala Badan Penyelidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

Capaian MP KKP per Satuan Kerja DJPDSPKP TW 3 - 2023		Per Unit Kerja DJPDSPKP	
SEKRETARIAT DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00%		
DIREKTORAT LOGISTIK	0,00%		
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU	0,00%		
DIREKTORAT PEMASARAN	0,00%		
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI			



CAPAIAN DJPDSPKP

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	NILAI SAAT INI
1	BERNY ACHMAD SUBKI	DIREKTUR LOGISTIK	DIREKTORAT LOGISTIK	0
2	WIDYA RUSYANTO	DIREKTUR PENGOLAHAN DAN ..	DIREKTORAT PENGOLAHAN D..	0
3	ERWIN DWYANA	DIREKTUR PEMASARAN	DIREKTORAT PEMASARAN	0
4	CATUR SARWANTO	DIREKTUR USAHA DAN INVEST...	DIREKTORAT USAHA DAN INV...	4
5	MACHMUD	SEKRETARIS DITJEN PENGUAT...	SEKRETARIAT DITJEN PENGUA...	0

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

Lampiran 5

Nilai Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
NOMOR 3442/DJPDPSPKP.0/RC.610/X/2023

Yth : Direktur Jenderal PDSPKP
 Dari : Sekretaris Ditjen PDSPKP
 Hal : Hasil Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Lampiran : Satu berkas
 Tanggal : 12 Oktober 2023

Bersama ini kami sampaikan capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan periode triwulan III tahun 2023 pada dashboard aplikasi SIDAK KKP per tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebesar 96,33% dengan rincian capaian IKU Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja per unit kerja Eselon II sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak Dirjen kami ucapkan terima kasih.


Machmud

Tembusan:
 1. Direktur Lingkup Ditjen PDSPKP
 2. Kepala BBP3KP

